



Judul : DPR jangan lukai hati rakyat
Tanggal : Jumat, 08 September 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR Jangan Lukai Hati Rakyat

Direktur Lima, Ray Rangkuti, mempertanyakan alasan DPR RI begitu giat membangun fisik dibanding moral dan etik.

ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com

BERBAGAI wacana pembangunan di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat mendapat sorotan dari Aliansi Masyarakat Sipil. Menu-rut gabungan dari beberapa lembaga sosial kemasyarakatan, seperti Indonesia Budget Center (IBC), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dan Lingkar Madani Indonesia (Lima), itu langkah tersebut melukai hati masyarakat.

Hal itu terungkap dalam audiensi dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9). Direktur Lima, Ray Rangkuti, mempertanyakan alasan DPR RI begitu giat membangun fisik gedung DPR RI dibandingkan membangun moral dan etik berdemokrasinya. Salah satunya pernyataan Wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah soal alun-alun demokrasi.

"Ini kan sama saja melukai hati masyarakat. Tidak ada keinginan kami untuk menghalang-halangi DPR membangun fisik, tapi pada saat yang bersamaan tidak ada implikasi dari itu semua yang salah satu ukurannya ialah kinerja," kata Ray.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyambut baik kritik itu. Ia mengklaim sejak awal rencana pembangunan gedung baru, maupun wacana pembangunan apartemen, DPP PAN sudah menolaknya.

"Mengenai pembangunan gedung, PAN tetap konsisten menolak, apalagi yang berbau apartemen," ujarnya.

Selain menolak pembangunan gedung, PAN juga konsisten untuk menolak kenaikan dana partai politik. Meski bakal menguntungkan partai, Yandri menilai langkah itu sebagai pemborosan dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjyo Kumolo memutuskan untuk

menaikkan dana bantuan parpol dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara.

Pertemuan bilateral

Di sela-sela penyelenggaraan Forum Parlemen Dunia di Nusa Dua, Bali, Ketua DPR Setya Novanto melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan parlemen Turki. Dalam acara itu, Turki mengapresiasi kondisi politik di Indonesia yang stabil selama dipimpin Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut berdampak pada kepercayaan Turki untuk terus berinvestasi di Tanah Air. Parlemen Turki, menurut Novanto, menginginkan peningkatan nilai perdagangan mencapai US\$10 miliar pada 2023.

"Saya menyambut baik hal ini. Untuk itu, kami sepakat melakukan komunikasi intensif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat," ujarnya, kemarin.

Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Turki, Forum Parlemen Dunia juga menyoroti soal korupsi yang dinilai akan menghambat pembangunan. Hal itu secara khusus menjadi fokus dalam diskusi panel antara Organisasi Parlemen Global Antikorupsi (GOPAC) bersama perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, ketika praktik korupsi masih masif, pembangunan tidak akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," kata wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (OL/P-5)